

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

*Interactive Governance* atau pemerintahan yang interaktif merupakan salah satu tipe dari konsep *governance* yang menitikberatkan kepada keterlibatan aktor-aktor lain diluar pemerintah yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang sedang terjadi dan memiliki kapabilitas untuk menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Salah satu bentuk pemerintahan yang interaktif yaitu pemerintahan yang berjejaring, yang mana dalam perspektif *networks* struktur relasi antar organisasi bersifat lentur dan tidak terikat secara permanen dalam proses kerjasama sehingga hubungan tersebut diikat atas dasar kepercayaan.

Pemerintah Nagari Sumanik mengajak perantau sebagai salah satu aktor jaringan dalam mewujudkan pembangunan Nagari Sumanik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini didasari karena perantau merupakan salah satu potensi yang dimiliki Nagari Sumanik. Peneliti menganalisis proses interaksi pemerintahan nagari dengan perantau menggunakan teori Empat Cara Meningkatkan Keefektifan *Governance Networks* menurut Torfing et al, yaitu *Institutional Design, Goal and Framework Steering, Process Management*, dan *Direct Participation*, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Nagari Sumanik sudah cukup interaktif dalam mengelola potensi perantau di Nagari Sumanik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi.

Pada Interaksi antara pemerintah nagari dengan perantau lebih banyak bersifat informal. Ini dikarenakan telah terbangunnya kepercayaan (*trust*) yang tinggi antara perantau dengan pemerintah nagari dalam melaksanakan kerjasama untuk membantu pembangunan nagari sumanik yang juga merupakan kampung halamannya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa interaksi pemerintahan nagari dengan perantau, seperti tidak adanya aturan tertulis antara pemerintahan nagari dengan perantau ketika melaksanakan kerjasama. Lalu, koordinasi yang dilakukan lebih banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, dan tidak adanya tenggat waktu yang diberikan sepihak oleh pemerintahan nagari mengenai pelaksanaan program yang direncanakan bersama perantau, melainkan tenggat waktu tersebut atas dasar kesepakatan bersama.

Pemerintah Nagari Sumanik juga telah mendesain institusinya untuk menunjang kerjasama dengan perantau, yaitu dengan memasukkan unsur rantau kedalam visi dan misi Nagari Sumanik, serta membuat sebuah bidang yang khusus menangani rantau seperti yang ada di kabupaten dan provinsi. Antara Pemerintahan Nagari Sumanik dengan perantau juga tidak terhubung dengan garis komando namun lebih kepada garis koordinasi, yang mana jika perantau ingin menyalurkan bantuan tidak melalui rekening nagari melainkan pemerintah nagari akan mengarahkan perantau untuk memberikan bantuannya langsung kepada yang bersangkutan. Untuk mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam pembangunan, pemerintah nagari telah membuka pintu selebar-lebarnya untuk segala ide dan gagasan dari aktor jaringan yang berkaitan dengan kemajuan pembangunan

Nagari Sumanik asalkan ide tersebut tidak menentang dengan peraturan atau adat istiadat yang ada di Nagari Sumanik.

Hal lain yang dilakukan Pemerintahan Nagari Sumanik dalam mengelola perantau yaitu dengan melibatkan dan memberikan sebuah program yang diinisiasi oleh perantau yang mana manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh sasaran dari pembangunan atau program tersebut. Posdaya Sumanik Sehat dan Program Pembinaan Aqidah/Akhlak dan Beasiswa merupakan contoh dari pembangunan atau program yang diinisiasi langsung oleh perantau dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Nagari Sumanik, bahkan oleh masyarakat dari nagari tetangga. Hal tersebut juga telah membangun kepercayaan perantau karena merasa kehadiran dan peran perantau berguna bagi kesejahteraan masyarakat yang berada di Nagari Sumanik dan pada akhirnya membuat hubungan kerjasama yang terjalin bersifat *sustainable*. Namun, perlu diingat bahwa *Interactive Governance* merupakan konsep yang lahir dari proses *trial and error* sehingga penting untuk melembagakan proses dan prosedur yang tampaknya berfungsi dengan baik dan mengambil pelajaran dari kegagalan yang ada selama proses kerjasama berlangsung.

## 6.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian *Interactive Governance* dalam Pengelolaan Potensi Perantau Untuk Pembangunan Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut;

1. Proses kerjasama dengan aktor jaringan agar tidak terjadi penyimpangan dan tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal yang disepakati bersama sebaiknya kesepakatan dibuat secara tertulis sebagai bukti fisik menjadi pegangan administrasi.
2. Penguatan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan di Nagari Sumanik dalam mengelola potensi perantau, sehingga semua stakeholder yang ada di nagari merasa dilibatkan dan merasa memiliki kegiatan pembangunan Nagari Sumanik.
3. Mendorong proses transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan pencatatan setiap dana yang masuk ke nagari yang berasal dari bantuan perantau walaupun dana tersebut tidak masuk ke rekening kas nagari, namun nagari perlu rekapan dana untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah pada akhir tahun untuk melihat potensi perantau dalam pembangunan nagari pada tahun berikutnya.
4. Membuat laporan terhadap seluruh aktivitas yang melibatkan partisipasi perantau dalam aktivitas pembangunan yang dilakukan sehingga hubungan kerjasama perantau dengan pemerintahan nagari dapat bersifat sustainable atau berkelanjutan.

5. Memiliki catatan dan foto dokumentasi setiap bantuan yang diberikan oleh perantau, hal ini agar sebagai arsip nagari untuk diperlihatkan kepada generasi perantau selanjutnya sehingga hubungan kerjasama perantau dengan pemerintah nagari dapat bersifat *sustainable* atau berkelanjutan.
6. Berbeda dengan teori governance lainnya yang terikat pada struktural kepengurusan, pada perspektif network governance aktor-aktor yang terlibat terikat pada suatu sistem kepercayaan. Maka dari itu teori ini cocok untuk melihat interaksi pemerintah nagari dengan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, karena nagari merupakan wilayah administratif yang masih memegang erat nilai-nilai kearifan lokal.
7. Dapat disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sarannya pada nagari/desa dilihat dari perspektif network governance. Karena selama ini pelaksanaan program-program tersebut menggunakan standar yang sama sementara kondisi nagari memiliki perbedaan-perbedaan seperti perbedaan kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal.

